



Implikasi Belanja Modal dan E-Government Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan

Ibnu Hamzami Ulfi¹
Nunuy Nur Afiah²
Sri Mulyani³

^{1,2,3} Universitas Padjadjaran, Indonesia

Corresponding Author: mahameru_nu2@yahoo.co.id

Article Info

Keyword:
Keyword 1; Financial Independence
Keyword 2; SPBE
Keyword 3. Public Expenditure

Kata Kunci:
Kata kunci 1; Kemandirian Keuangan
Kata kunci 2; SPBE
Kata kunci 3; Pengeluaran publik

Abstract: This study aims to determine the effect of capital expenditures and e-government implementation on the financial performance of local governments. The population in this study is the local government in South Sumatra and Bangka Belitung, with the sampling technique using purposive sampling and observation time for 3 years, which produces 45 observational data. This type of research is quantitative research. The data analysis technique in this study used panel data regression with a random effect model (REM) approach. Based on the results of data analysis, it is known that capital expenditure partially has no effect on financial performance as measured by the independence ratio. Implementation of e-government has a positive effect and significant impact on financial performance. Then capital expenditures and the implementation of e-government simultaneously have a significant positive effect on financial performance

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh belanja modal dan implementasi e-government terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan pengambilan sampel purposive dan waktu pengamatan selama 3 tahun, yang menghasilkan 45 data observasional. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan random effect model (REM). Berdasarkan hasil analisis data, diketahui bahwa belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio independensi. Pelaksanaan e-government berpengaruh positif dan berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian belanja modal dan pelaksanaan e-government secara bersamaan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan

Article History: Received 12 September 2022, Revised 27 September 2022, Accepted: 27 September 2022

PENDAHULUAN

Diberlakukannya otonomi daerah membawa imbas bagi pemerintah daerah untuk siap menerima tanggung jawab yang dilimpahkan oleh pusat untuk kemudian dikelola menjadi urusan rumah tangganya sendiri (Akbar & Maraini, 2021). Pemerintah daerah diharapkan mampu dalam mengembangkan daerahnya secara luas, bertanggung jawab serta dapat memberdayakan masyarakatnya dengan melihat berbagai potensi yang dimiliki daerah tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah merupakan pihak yang memiliki peran strategis karena bersinggungan langsung dengan masyarakatnya, sehingga lebih memahami struktur ekonomi daerah, demografi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah juga menuntut pemerintah daerah agar memiliki kemandirian, sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, karena ketergantungan membuat pemerintah daerah kehilangan kebijaksanaan lokal dalam membuat keputusan penting (Subagyo et al., 2021). Mencapai kemandirian juga merupakan salah satu barometer dalam mengukur kinerja pemerintah baik secara kuantitatif dalam kinerja keuangan maupun kualitatif dalam kesejahteraan rakyat di daerahnya (Silitonga et al., 2021). Desakan memiliki kinerja yang lebih baik sering ditujukan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan keuangan daerah/kemandiriannya (Purba & Mimba, 2019). Sehingga upaya-upaya dalam meningkatkan kemandirian daerah sebagai bagian dari kinerja keuangan dirasa perlu untuk diperhatikan dengan serius oleh pemerintah daerah saat ini. Normalita & Mahmud (2017) serta Ruliana (2015) menyatakan bahwa usaha dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terbukti mempengaruhi tingkat kemandirian daerah.

Namun sayangnya kondisi PAD di pemerintah daerah belum sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan data realisasi APBD Tahun 2020 yang dirilis oleh DJPK Kemenkeu per 8 September 2021 memperlihatkan bahwa rata-rata andil yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan masih tergolong minim, hanya berkisar 23,67 persen, turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. Persentase PAD Tahun 2018-2020

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	%
2018	1.110.964.488.871.000	272.981.058.902.005	24,57
2019	1.198.407.263.749.370	293.659.554.462.927	24,50
2020	1.115.490.968.926.317	264.065.968.926.317	23,67

Sumber: DJPK Kemenkeu, 2021 (diolah)

Hasil tersebut menunjukkan pula bahwa nyatanya sampai saat ini sebagian besar pemerintah daerah dapat dikatakan masih belum mandiri dan sangat bergantung dengan bantuan pusat. Hal ini perlu menjadi perhatian serius untuk dicari solusi dalam meningkatkan penerimaan daerah sebagai bagian penting dari tingkat kemandirian.

Kondisi tersebut dialami juga oleh semua pemerintah daerah di Bangka Belitung, ini ditunjukkan oleh tingkat kapasitas fiskal yang sangat rendah berdasarkan PMK Nomor 116/PMK.07/2021. Kapasitas fiskal yang rendah berarti kemampuan keuangan dalam memperoleh penerimaan daerah sangat kecil. Padahal tujuan dimekarkannya wilayah Bangka Belitung dari Sumatera Selatan adalah agar wilayah tersebut dapat secara mandiri mengelola keuangannya dengan memperhatikan sumber daya daerah yang dimiliki dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Namun hal berbeda ditunjukkan oleh Sumatera Selatan yang dulu merupakan wilayah induk dari Bangka Belitung yang termasuk dalam provinsi dengan pendapatan daerah terbesar di Indonesia (money.kompas.com, 2022).

“Implikasi Belanja Modal dan E-Government Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan”

Belanja modal dapat menjadi solusi permasalahan tersebut. Astiti & Mimba (2016) menyebutkan bahwa penerimaan daerah dapat ditingkatkan melalui peran dari belanja modal karena dapat membantu pemerintah daerah mendapatkan sumber keuangan yang berasal dari kekhususan daerah tersebut sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Tidak berbeda jauh, Akbar & Maraini (2021) serta Malau et al (2019) menyatakan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menaikkan pendapatan asli daerah yang merupakan komponen dasar dalam tingkat kemandirian dapat ditempuh dengan mengalokasikan atau merealisasikan belanja modal dengan tujuan untuk meningkatkan infrastruktur di daerahnya terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, transportasi, kemajuan pariwisata dan juga kemajuan perekonomian setempat sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat pembangunan daerah.

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang bertujuan mendapatkan aset tetap yang memiliki umur manfaat lebih dari setahun yang ditujukan dalam memberikan pelayanan publik. Sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai ditambah dengan pelayanan yang baik dalam melayani masyarakat akan meningkatkan rasa kepercayaan sehingga barang/jasa yang ditawarkan oleh pemerintah akan menjadi pilihan utama. Mardiasmo (dalam Yuliani, 2019) mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya pelayanan publik yang diberikan pada akhirnya akan memberikan dampak pada meningkatnya partisipasi publik yang dapat dilihat dari adanya kenaikan pada penerimaan daerah. Astiti & Mimba (2016) mengemukakan hal yang serupa bahwa peran dari belanja modal dapat membuat penerimaan daerah meningkat dan secara langsung mempengaruhi tingkat kinerja pemerintah daerah.

Pirade et al (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pengeluaran pembangunan berpengaruh signifikan dan berdampak positif terhadap pendapatan, dengan kata lain pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung meningkatnya penerimaan daerah. Maka sudah saatnya pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penggunaan belanja modal dengan memperhatikan kegiatan mana saja yang dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai faktor penting dalam kinerja keuangan yang diukur dari tingkat kemandirian. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Fisoranti (2012) bahwa pemerintah daerah perlu memberikan alokasi belanja daerah (belanja modal) yang lebih besar serta menjadi prioritas utama untuk sektor-sektor produktif. Dari uraian tersebut dengan didukung oleh penelitian terdahulu, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

H1: Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Selain membangun infrastruktur dasar dalam pelayanan publik, saat ini pemerintah daerah juga perlu memperhatikan dalam membangun serta mengembangkan penerapan teknologi beserta infrastruktur pendukungnya. Okolo et al (2018) menyatakan bahwa salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah kemajuan teknologi. Seperti yang terlihat dan dirasakan bahwa saat ini kehidupan manusia sudah tidak dapat lagi dipisahkan dari yang namanya teknologi. Kemajuan teknologi telah membawa dampak besar bagi kehidupan manusia, berbagai proses pekerjaan yang semula dilakukan manual telah bertransformasi menjadi proses yang lebih mudah dan efisien bahkan sudah dapat dilakukan proses otomatisasi. Sektor pemerintahan pun tidak ketinggalan, Benjamin & Potts (2018) menjelaskan bahwa terdapat gerakan yang laur biasa secara global dalam menghadirkan layanan digital dalam pemerintahan. Sehingga lahirlah istilah *e-government* sebagai akibat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan pemerintahan. Sutopo et al (2017) menjelaskan bahwa

“Implikasi Belanja Modal dan E-Government Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan”

e-government memberikan keterbukaan publik, keefektifan layanan dan mampu memberdayakan masyarakat di pedesaan dan wilayah terpencil.

E-Government umumnya dikonsepsi sebagai penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICTs) oleh pemerintah yang dikombinasikan dengan perubahan organisasi untuk meningkatkan struktur dan operasi pemerintahan (Twizeyimana & Andersson, 2019). *E-government* memiliki potensi besar dalam mendapatkan efisiensi melalui penyederhanaan dan otomatisasi pengiriman layanan (Manoharan & Ingrams, 2018). Salah satu manfaat yang didapat dari diterapkannya *e-government* adalah dapat meningkatkan pendapatan daerah (Zulhakim, 2012; Indrajit, 2016; Indrayani, 2020). Hal ini dikarenakan mampu memberikan partisipasi aktif dari masyarakat, mampu menjangkau masyarakat dan daerah yang lebih luas serta mampu menekan kecurangan dalam transaksi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Kochanova et al (2019) bahwa elektronifikasi pada layanan pemerintah seperti pada layanan perpajakan harus mampu mengurangi biaya pada pengguna baik individu maupun bisnis, adanya kepatuhan pada peraturan dan juga meningkatkan pendapatan pajak. Peningkatan pendapatan daerah tentu sangat diharapkan oleh seluruh pemerintah daerah karena merupakan faktor penting dari kinerja keuangan atau yang dalam hal ini adalah kemandirian daerah. Sutopo et al (2017) bahkan sampai menyebutkan bahwa proses meningkatnya kinerja pemerintah dapat disebabkan oleh faktor adanya penerapan dari *e-government*.

Peningkatan PAD tentu menjadi suatu hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah daerah, terlebih lagi dalam upaya mencapai kemandirian daerah yang merupakan ukuran kinerja keuangan. Oleh karenanya, saat ini *e-government* telah menjadi suatu keharusan yang perlu disediakan oleh instansi pemerintah (pusat dan daerah) terlebih dengan ditetapkannya Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dari beberapa uraian di atas dan penelitian terdahulu, maka dapat dibuatkan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H2: E-Government berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk melihat bagaimana upaya dari pemerintah daerah di wilayah Bangka Belitung untuk menggunakan belanja modalnya dan juga perkembangan *e-government* yang ada, dan juga disandingkan dengan keadaan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan sebagai bekas daerah induk dari Bangka Belitung. Penelitian terdahulu banyak yang tidak memperhatikan time lag atas pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya, selain itu banyak juga dari penelitian sebelumnya yang menggunakan total belanja modal sebagai perhitungan. Namun hal itu dirasa kurang tepat karena bagaimanapun tidak semua belanja modal yang dapat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja keuangannya dan terutama dalam meningkatkan PAD. Ada beberapa belanja modal yang memang hanya digunakan untuk operasional pemerintahan dan ada beberapa belanja modal yang memang ditujukan untuk meningkatkan PAD dan perekonomian masyarakat. Oleh karenanya pada penelitian ini mencoba menerapkan time lag (t-1) pada variabel belanja modal dan *e-government* untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja keuangan di tahun berikutnya dan juga menggunakan belanja modal kegiatan publik saja sebagai ukuran dari belanja modal itu sendiri, sehingga diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang optimal berdasarkan data yang terjadi di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan, khususnya dalam membantu daerah mencapai kemandirian.

METODDE

Desain penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah dengan pendekatan metode kuantitatif verifikatif. Kuantitatif dapat dimaknai sebagai penelitian yang dalam proses penelitiannya terdiri dari proses pengumpulan, analisis hingga pelaporan dengan menitikberatkan pada penggunaan angka. Sedangkan maksud dari verifikatif adalah penelitian ini dimaksudkan untuk menguji suatu teori yang telah ada maupun penelitian sebelumnya dengan melihat suatu hubungan/pengaruh secara sistematis dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dirumuskan dalam suatu hipotesis.

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yang diambil dari beberapa laporan seperti Laporan Realisasi APBD, Hasil Evaluasi SPBE dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Data dan laporan tersebut diperoleh peneliti dari berbagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menghimpun data-data tersebut, yaitu: Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), serta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)

Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan software Eviews. Pertama adalah statistik deskriptif, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan model regresi, dilanjutkan uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, multikolinearitas serta heteroskedastisitas). Setelah itu dilakukan uji hipotesis yang memenuhi syarat uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. Berdasarkan uraian diatas dan juga dengan memperhatikan time lag (t-1) untuk variabel belanja modal dan *e-government*, maka dapat dibuatkan model rumus perhitungan regresi untuk pengujian hipotesis 1 dan 2 sebagai berikut:

$$K_Keu_{it} = \alpha + \beta_1 BM_{it-1} + \beta_2 E_Gov_{it-1} + e \dots\dots\dots 1$$

Keterangan:

- K_Keu_{it} : Kinerja Keuangan (rasio kemandirian) pemda i tahun t
- α : Konstanta
- β_{1,2} : Koefisien regresi
- BM_{it-1} : Belanja Modal pemda i pada tahun t-1
- E_Gov_{it-1} : E-Government (Indeks SPBE pemda i pada tahun t-1)
- e : Tingkat kesalahan penduga dalam model ini

Pemerintah daerah di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dijadikan populasi dalam penelitian ini yang berjumlah 26 pemda dengan digunakan rentang waktu selama tiga tahun, yaitu tahun 2019-2021. Pada penelitian ini, digunakan teknik *purposive sampling* dalam membantu peneliti untuk mengambil sampel dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Populasi yang digunakan adalah seluruh pemda di Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung	26 pemda
2	Pemda yang lampiran 1.3 Perda Pertanggungjawaban tidak bisa didapatkan	(11 pemda)
3	Sehingga sampel yang digunakan adalah	15 sampel
4	Rentang waktu	3 tahun
5	Data yang diobservasi	45 data

Pengukuran Variabel

Pada penelitian ini kinerja keuangan adalah variabel dependen (Y) yang diukur menggunakan rasio kemandirian berdasarkan data hasil realisasi APBD DJPK Kemenkeu, sedangkan variabel independennya adalah Belanja Modal (X1) yang diukur dengan menggunakan rasio belanja modal publik, *E-Government* (X2) yang diukur dengan Indeks SPBE. Adapun rumus pengukuran dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- Rasio Kemandirian: (total PAD)/ (total pendapatan daerah) x100..... 2
- Rasio belanja modal publik: (Belanja Modal Kegiatan Publik)/(Total Belanja Modal) x100.. 3
- *E-Government*: Indeks SPBE..... 4

TEMUAN DAN DISKUSI

Statistik Deskriptif

Berdasarkan olah data dengan bantuan aplikasi Eviews didapatkan hasil untuk statistik deskriptif sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	BM	EGOV	TKD
Mean	65.72956	2.344889	13.57689
Median	65.82000	2.310000	10.64000
Maximum	83.28000	3.220000	42.84000
Minimum	39.61000	1.350000	3.450000
Std. Dev.	9.306135	0.550213	9.096061
Observations	45	45	45

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2022

Berdasarkan tabel rata-rata belanja modal untuk tujuan publik adalah sebesar 65,73 dan diartikan bahwa pemerintah daerah yang dijadikan sampel pada penelitian ini telah mengalokasikan dan merealisasikan belanja modalnya lebih dari 50% dari total belanja modal yang ada untuk tujuan kepentingan publik. Sedangkan nilai maksimum belanja modal adalah 83,28 yang merupakan realisasi belanja modal dari Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 yang sedang berfokus pada perbaikan jalan. Nilai indeks SPBE adalah 2,34 tidak jauh berbeda dengan Indeks SPBE secara nasional yaitu 2,29 di tahun 2021. Nilai tersebut apabila diinterpretasikan berdasarkan Permenpanrb No 5 Tahun 2018 berada pada predikat cukup. Kinerja keuangan yang diukur dengan rasio kemandirian mendapatkan hasil rata-rata adalah 13,57. Nilai tersebut jika diinterpretasikan berdasarkan pola hubungan situasional otonomi daerah seperti yang dipaparkan oleh Patarai (2018) berada pada tingkat instruktif yang memiliki arti bahwa rata-rata kemampuan keuangan di daerah yang dijadikan sampel pada penelitian ini masih tergolong rendah, sehingga daerah masih sangat membutuhkan bantuan pembiayaan dari pemerintah pusat.

Pemilihan Model Regresi

Menurut Sriyana (2014) dengan digunakannya analisis regresi data panel dapat menjadi suatu solusi dalam memecahkan beberapa masalah yang dihadapi ketika digunakannya data runtut waktu dan juga data cross section, selain itu regresi data panel dapat menghasilkan analisis statistik yang lebih baik dengan dihasilkannya *degree of freedom* yang lebih besar. Untuk menentukan berbagai model manakah yang sesuai bagi penelitian ini, selanjutnya akan dilakukan pengujian model yaitu Uji Chow (*Likelihood Ratio*) untuk memutuskan model mana yang lebih baik antara *Common Effect* dibandingkan *Fixed Effect* dan *Hausman Test* untuk

“Implikasi Belanja Modal dan E-Government Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan”

menentukan apakah model *Fixed Effect* yang lebih dominan digunakan dibandingkan *Random Effect*, dan terakhir adalah dilakukan uji *Lagrange Multiplier* untuk menentukan apakah model *Random Effect* yang digunakan dibandingkan *Common Effect* yang lebih baik.

Uji Chow

Tabel 4. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: FIXED			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.558919	(14,28)	0.0021
Cross-section Chi-square	46.001539	14	0.0000

Sumber: Olah data Eviews, 2022

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai Prob. (p-value) *Cross section* F sebesar 0.0000 dan dikarenakan Probability (p-value) *Cross-section* F < 0.05, maka H0 ditolak, sehingga model yang digunakan adalah *fixed effect*. Dikarenakan keputusan yang diperoleh adalah menggunakan *fixed effect*, sehingga dilanjutkan dengan uji *Hausman*.

Uji Hausman

Tabel 5. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: RANDOM			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.620169	2	0.0602

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2022

Tabel 5 di atas menunjukkan hasil dari uji hausman dengan nilai probability (p-value) *Cross-section random* sebesar 0.0602. Sehingga dari hasil tersebut dan jika dibandingkan dengan kriteria yang ada maka model *random effect* lebih baik daripada model *fixed effect*. Sehingga disimpulkan pada penelitian ini model yang digunakan adalah model *random effect*.

Uji Lagrange Multiplier

Dikarenakan hasil uji hausman memilih *random effect model* maka perlu dilakukakan pengujian selanjutnya yaitu *Lagrange Multiplier Test* dengan menggunakan pendekatan *Breusch Pagan* untuk menentukan mana yang lebih baik antara *random effect model* ataukah *common effect model*.

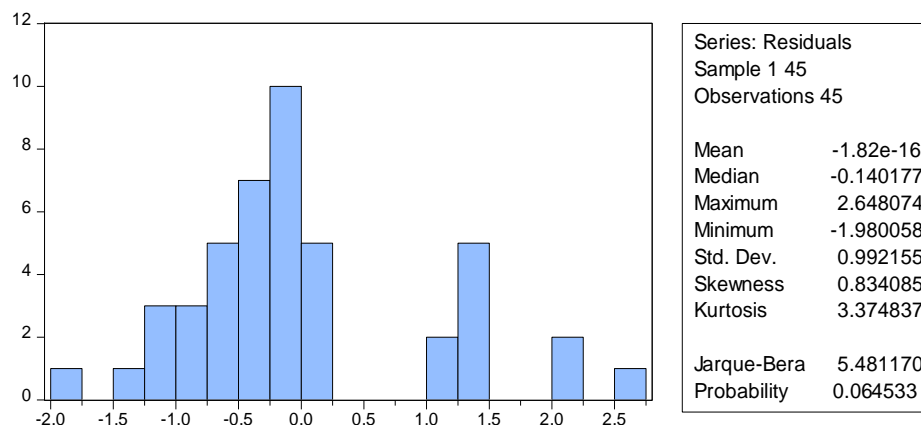
Tabel 6. Hasil Uji LM

Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	5.345219 (0.0208)	0.000208 (0.9885)	5.345426 (0.0208)

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2022

Hasil pengujian yang ditampilkan oleh tabel 6 menunjukan bahwa nilai *probability (both)* dari *Breusch Pagan* adalah 0.0208 atau lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 ($0,0208 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih dalam penelitian ini adalah *random effect model* (REM).

Uji Normalitas



Gambar 1. Grafik Hasil Uji Normalitas

Sumber: Olah data Eviews, 2022

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	1.692734	Prob. F(2,42)	0.1963
Obs*R-squared	3.356715	Prob. Chi-Square(2)	0.1867
Scaled explained SS	3.472097	Prob. Chi-Square(2)	0.1762

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2022

Probabilitas dari *Obs*R-squared* adalah sebesar 0,1867, nilai ini lebih besar daripada 0,05 atau $0,1867 > 0,05$ yang mengindikasikan model tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

R-squared	0.137852	Mean dependent var	2.129259
Adjusted R-squared	0.096797	S.D. dependent var	0.856997
S.E. of regression	0.814464	Sum squared resid	27.86079
F-statistic	3.357758	Durbin-Watson stat	1.763906
Prob(F-statistic)	0.044384		

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2022

Hasil durbin watson pada tabel 4.8 menunjukkan nilai 1.763906. Kemudian dibandingkan dengan nilai dL dan dU pada tabel Durbin-Watson. Untuk $\alpha = 0.05$, $k = 2$ dan $n = 45$, diperoleh $dL=1.4298$ dan $dU = 1.6148$. Karena nilai Durbin-Watson di antara nilai dU dan $4-dU$ ($1.615 < 1.763906 < 2.3852$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah dalam rumus regresi yang diformulasikan terjadi adanya ketidaksamaan varian. Secara sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan diregresi terhadap variabel bebas lainnya.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
BM	0.000271	52.05025	1.000577
E_GOV	0.077464	19.58687	1.000577
C	1.652635	72.11528	NA

Sumber: Hasil olah data Eviews, 2022

Sebagai dasar pengambilan keputusan pengujian multikolinearitas bahwa nilai VIF harus < nilai 10,00. Jika melihat hasil pada tabel tersebut terlihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF di bawah 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model tidak terdapat masalah multikolinieritas.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 10. Hasil Regresi Data panel

Dependent Variable: KKD?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Included observations: 3				
Cross-sections included: 15				
Total pool (balanced) observations: 45				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.293218	1.042826	1.240109	0.2218
BM?	0.013555	0.014553	0.931394	0.3570
EGOV?	0.572244	0.241987	2.364773	0.0227
Statistics Weighted				
R-squared	0.137852	Mean dependent var	2.129259	
Adjusted R-squared	0.096797	S.D. dependent var	0.856997	
S.E. of regression	0.814464	Sum squared resid	27.86079	
F-statistic	3.357758	Durbin-Watson stat	1.763906	
Prob(F-statistic)	0.044384			

Sumber: Olah data Eviews, 2022

Berdasarkan tabel 10 di atas, dapat diketahui nilai konstanta dan koefisien masing-masing variabel, sehingga dapat dibentuk dalam persamaan regresi data panel sebagai berikut:

$$K_Keu = 1.293218 + 0.572244 BM + 1.293218 EGOV \dots\dots\dots 5$$

Dari model statistik di atas dapat diartikan sebagai berikut: 1) Nilai α sebesar 1.293218 memiliki arti apabila belanja modal dan *e-government* bernilai nol, maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan bernilai 1.293218 satuan; 2) Koefisien regresi variabel belanja modal adalah positif dengan nilai sebesar 0.0572244 yang berarti jika terjadi perubahan peningkatan belanja modal sebesar 1 satuan (dengan asumsi variabel lain konstan), maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 0.572244 satuan; 3) Koefisien regresi variabel *e-government* adalah positif dengan nilai sebesar 1.293218 yang berarti jika terjadi perubahan peningkatan *e-government* sebesar 1 satuan (dengan asumsi variabel lain konstan), maka kinerja keuangan pemerintah daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1.293218 satuan.

Uji F-statistik (pengaruh simultan)

Uji F-statistik simultan dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Ketentuan pengambilan keputusan, apabila nilai prob. (F statistic) $< 0,05$ (taraf signifikansi 5%), maka H_0 ditolak yang berarti variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Namun, jika prob. (F statistic) $> 0,05$ (taraf signifikansi 5%), maka H_0 diterima yang berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

Berdasarkan tabel 10 di atas, diperoleh bahwa nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.044384 atau lebih kecil dari 0,05 ($0,044384 < 0,05$). Hasil ini dapat dimaknai bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel belanja modal dan implementasi *e-government* dapat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Uji t-statistik (pengaruh parsial)

Uji t atau pengaruh parsial dilakukan untuk menentukan nilai koefisien regresi secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen apakah signifikan atau tidak. Berdasarkan data yang ditunjukkan oleh tabel 10, untuk menjawab hipotesis yang diajukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai p-value (sig.) variabel belanja modal sebesar 0.3570. Dikarenakan nilai prob. (p-value) > 0.05 (taraf signifikansi 5%) atau $0.3570 > 0.05$, maka H_0 yang diterima atau dapat diperoleh kesimpulan bahwa belanja modal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- b. Nilai p-value (sig.) variabel *e-government* sebesar 0.0227. Dikarenakan nilai prob. (p-value) < 0.05 (taraf signifikansi 5%) atau $0.0227 < 0.05$, maka H_2 dapat diterima dan diperoleh kesimpulan bahwa *e-government* berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Koefisien Determinasi

Tujuan dari pengujian ini yaitu untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen secara bersamaan. Nilai R^2 berkisar antara nol dan satu. Semakin mendekati satu, maka semakin dekat hubungan antara variabel independen dan dependen. Pada tabel 10 terlihat bahwa nilai dari *R-squared* adalah 0,137852, dibulatkan menjadi 0,1379 atau 13,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal dan implementasi *e-government* mampu menjelaskan kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 13,79%, sedangkan sisanya 86,21% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki arah yang positif namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2020); Malau et al (2019); serta Thalib & Ekaningtias (2019) yang menyatakan bahwa belanja modal memiliki nilai koefisien yang positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian daerah. Bahkan Nugraheni & Adi (2020) dengan menggunakan *meta-analysis* menyatakan bahwa belanja modal menunjukkan tidak adanya hubungan yang signifikan terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal bukan merupakan faktor yang dapat menentukan keberhasilan dari kinerja keuangan pemerintah daerah.

“Implikasi Belanja Modal dan E-Government Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan”

Tidak berpengaruhnya belanja modal terhadap kinerja keuangan atau khususnya terhadap kemandirian daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: pertama, program atau kegiatan publik yang didalamnya terdapat belanja modal namun dalam pelaksanaan kurang berjalan dengan baik. Nugraheni & Adi (2020) menjelaskan bahwa realisasi yang kurang baik mengakibatkan program yang telah dirancang tidak berjalan dengan optimal. Kedua, adalah anggaran maupun realisasi belanja modal yang cenderung relatif kecil dibandingkan dengan belanja pegawai maupun belanja barang jasa baik itu diwilayah Provinsi Sumatera Selatan maupun di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Padahal belanja modal merupakan instrumen penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, kinerja ekonomi yang baik, produktivitas lebih tinggi maupun dapat menarik investor asing (Azolibe, 2021). Dikutip dari buku “Dua Dekade Desentralisasi Fiskal” (Puspita et al., 2021) bahwa selama periode 2001 hingga 2021 rata-rata porsi belanja modal untuk tingkat provinsi adalah 19.65 persen, 23.49 untuk tingkat kabupaten dan 22.69 untuk tingkat kotamadya. Indikasi lain adalah bahwa terjadinya fenomena *flypaper effect* dalam belanja modal. Lhutfi et al (2019) menyampaikan secara faktual bahwa yang terjadi di pemerintah daerah ditemukan bahwa banyak alokasi belanja modal yang ternyata berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau dana lain yang berasal dari Pemerintah Pusat. Bahkan Mutiah & Mappanyuki (2015) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh yang besar dalam keputusan belanja modal.

Pengaruh E-Government Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil pada penelitian membuktikan bahwa *e-government* yang diukur menggunakan Indeks SPBE memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini mendukung beberapa penelitian serupa, seperti yang dilakukan oleh Purwokoadi (2014) dalam melihat dampak di aplikasikannya *e-government* khususnya dalam pembayaran PKB yang menghasilkan arah positif dan signifikan terhadap kinerja *cash administration* di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Penelitian oleh Sutopo (2017) juga menghasilkan arah yang positif antara *e-goverment* dengan kinerja administrasi pemerintahan. Hasil serupa juga diperoleh Kurniasih (2013) dengan menggunakan eksplanatori survey menghasilkan bahwa kebijakan *e-government* memberikan dampak sebesar 54,85 persen terhadap kinerja di Kota Cimahi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki nilai skor *e-government* tinggi cenderung memiliki kinerja yang tinggi pula. Kareem & Haseeni (2015) menyampaikan hal serupa bahwa terdapat hubungan yang kuat dan korelasi yang signifikan antara *e-government* dengan kinerja organisasi. Sehingga dirasa sangat diperlukan untuk menghadirkan layanan pemerintahan secara elektronik demi meningkatkan kualitas pelayanan untuk kinerja yang lebih baik (Talab et al., 2018).

Provinsi Sumatera Selatan sendiri telah mendapatkan hasil dari penggunaan elektronifikasi pada layanan perpajakan, khususnya layanan pajak kendaraan bermotor dengan menghadirkan aplikasi e-dempo yang berlaku juga di semua kab/kota di Sumatera Selatan. Seperti dirangkum dari sumsel.inews.id (2020), Kepala Bapenda Prov. Sumatera Selatan Neng Muhaiba menyatakan bahwa penerimaan PAD Provinsi Sumatera Selatan telah melebihi target yang diharapkan yaitu Rp3,13 triliun atau sebesar 102,3 persen dan bahwa peningkatan tersebut dibantu juga oleh aplikasi e-dempo yang mampu mencatatkan transaksi hingga Rp1,1 miliar. Selaras dengan yang disampaikan oleh Kochanova et al (2019) bahwa penerapan *e-government* secara substansial dapat memingkatkan kapasitas pemerintah, mengurangi biaya kepatuhan pajak dan dalam beberapa kondisi dapat meningkatkan pengumpulan pendapatan pajak. Adanya kemudahan dalam pembayaran pajak tersebut dapat membuat kesadaran masyarakat meningkat yang dapat tercermin dalam peningkatan pembayaran pajak. Hal

“Implikasi Belanja Modal dan E-Government Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan”

tersebut disampaikan juga oleh Demir & Eđmir (2019) bahwa dengan adanya sistem perpajakan elektronik memiliki efek positif pada kepatuhan pajak oleh masyarakat dan juga timbulnya efisiensi dalam proses perpajakan. Sarah Nita Hasibuan selaku analis kebijakan pada Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyatakan bahwa faktor kunci dalam membantu pemerintah keluar *flypaper effect* dan mendorong kemandirian adalah penerapan ekonomi digital, otomatisasi pelayanan dan selalu responsif terhadap setiap kebijakan (ekonomi.bisnis.com, 2021). Hal ini menjadi bukti bahwa dengan semakin baiknya implementasi *e-government* terutama dalam membantu pemerintah daerah dalam memungut pajak maupun retribusi daerah maka akan memberikan dampak dalam peningkatan kinerja keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data menunjukkan bahwa belanja modal pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dari rasio kemandirian di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan wilayah Provinsi Kep. Bangka Belitung. Beberapa faktor penyebabnya antara lain adalah pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal, rendahnya alokasi maupun realisasi dari belanja modal itu sendiri dan terjadinya fenomena *flypaper effect* pada belanja modal. Implementasi *e-government* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan dapat diartikan bahwa peningkatan skor SPBE akan membuat kinerja keuangan daerah semakin baik. Hadirnya adanya layanan pemerintahan berbasis elektronik terutama dalam konteks penerimaan pajak maupun retribusi daerah atau pendapatan asli daerah lainnya mampu memberikan peningkatan penerimaan daerah. Hal ini tentu menjadi modal dasar, dalam rangka membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan asli daerahnya, yang tentu juga akan membuat tingkat kemandirian daerah naik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Y. R., & Maraini. (2021). The Role Of Good Governance In Economic Growth: Mediated By Regional Financial Performance And Capital Expenditure Allocation. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*, 2(3), 194–208. <https://www.ilomata.org/index.php/>
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 105–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2>
- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. S. H. (2016). Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1924–1950.
- Azolibe, C. B. (2021). Public Capital Expenditure, Economic Growth and Foreign Direct Investment in Nigeria: An Empirical Analysis. *The Journal of Developing Areas*, 55(3), 317–342. <https://doi.org/10.1353/jda.2021.0067>
- Benjamin, K., & Potts, H. W. (2018). Digital transformation in government: Lessons for digital health? *DIGITAL HEALTH*, 3, 1–5. <https://doi.org/10.1177/2055207618759168>
- Demir, İ. C., & Eđmir, R. T. (2019). The Effect of Electronic Taxation System on Voluntary Tax Compliance. *International Public Finance Conference*, 24(27), 353–356. <https://doi.org/10.26650/pb/ss10.2019.001.053>
- DJPK Kemenkeu. (n.d.). *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Setelah TA 2006*. Retrieved August 27, 2022, from <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>

“Implikasi Belanja Modal dan E-Government Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan”

- Hasibuan, S. N. (2021). *Keuangan Daerah: Keluar dari Flypaper Effect*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20210721/9/1419922/keuangan-daerah-keluar-dari-flypaper-effect#.YPvB5oZ_17U
- Kareem, M. A., & Haseeni, Z. J. (2015). E-Government and Its Impact on Organizational Performance. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 3, 664–672. www.researchpublish.com
- Kochanova, A., Hasnain, Z., & Larson, B. (2019). Does E-Government Improve Government Capacity? Evidence from Tax Compliance Costs, Tax Revenue, and Public Procurement Competitiveness. *American Historical Review*, 124(2), 101–120. <https://doi.org/10.1093/wber/lhx024>
- Lhutfi, I., Ritchi, H., & Yudianto, I. (2019). Bagaimana Pemerintah Daerah Merespon Fiscal Stress? *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10(2), 76–81. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36982/jiegm.v10i2.840>
- Malau, E. I., Erlina, & Sirojuzilam. (2019). The Effect Of Local Government Revenue (LGR), Balance Fund, Capital Expenditure and Fiscal Stress on The Financial Performance of Regional Government in The District / City of Sumatera Utara Province. *International Journal of Public Budgeting, Accounting and Finance*, 2(2), 1–15.
- Manoharan, A. P., & Ingrams, A. (2018). Conceptualizing E-Government from Local Government Perspectives. *State and Local Government Review*, 50(1), 56–66. <https://doi.org/10.1177/01603223x18763964>
- money.kompas.com. (2022). *Daftar Provinsi dengan Pendapatan Daerah Terbesar di Indonesia* Halaman all - Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2022/03/05/121701426/daftar-provinsi-dengan-pendapatan-daerah-terbesar-di-indonesia?page=all>
- Mutiah, & Mappanyuki, R. (2015). The Effect of Surplus Budget Financing, Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Regional Revenue, and Characteristics of Local Government on Decision of Capital Expenditure (Survey in Local Government in Indonesia). *Research Journal of Finance and Accounting Wwww.Iiste.Org ISSN*, 6(9), 14–21. www.iiste.org
- Normalita, I. S., & Mahmud, A. (2017). Accounting Analysis Journal Analysis of Capital Expenditure and Its Implications on Local Financial Independence. *AAJ: Accounting Analysis Journal*, 6(2), 219–228. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398>
- Patarai, M. I. (2018). *Kinerja Keuangan Daerah* (2nd ed., Vol. 2). De La Macca.
- Permenpanrb No 5 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Perpres No 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pirade, R., Mus, H. A. R., Mas'ud, Hj. M., & Nur, Hj. A. N. (2018). Evaluating financial performance in local government: A study in South Sulawesi Province (Indonesia). *Research in Business and Management*, 5(2), 31. <https://doi.org/10.5296/rbm.v5i2.12791>
- PMK Nomor 116/PMK.07/2021, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2021 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. www.jdih.kemenkeu.go.id

“Implikasi Belanja Modal dan E-Government Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Bangka Belitung dan Sumatera Selatan”

- Purwokoadi, S. (2014). Pengaruh Penerapan Aplikasi e-government Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kinerja Cash Administration. *DIA, Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 1–18.
- Puspita, D., Pahlevi, M., Raharja, Y. M., Hadi, S., Baroto, A. L., Permana, A. W., Rahayu, W. T., Prasetya, F., Chalil, T. M., & Soewardi, T. J. (2021). *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal di Indonesia* (U. S. Hamidi & D. Puspita, Eds.). Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu.
- Ruliana, T. (2015). Revenue Independence of East Kalimantan Province, Indonesian. *Journal of Asian Scientific Research*, 5(7), 340–348. <https://doi.org/10.18488/journal.2/2015.5.7/2.7.340.348>
- Silitonga, N., Haymans Manurung, A., Mayangsari, S., & Sormin, P. (2021). The Moderating Effect Of Regional Independence On The Effect Of Financing Policies, Capital Expenditure And Transfer Fund Towards The Performance Of Local Governments. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(3), 5239–5251. <https://doi.org/https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i3.2153>
- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Subagyo, Sirat, A. H., & Suwito. (2021). The Effect of Audit Results and Local Characteristics on Financial Performance of Province Governments in Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting*, 12(14), 57–65. <https://doi.org/10.7176/rjfa/12-14-06>
- sumsel.inews.id. (2020). *Raup Rp3,13 Triliun, Pendapatan Pajak Sumsel di Tahun 20Raup Rp3,13 Triliun, Pendapatan Pajak Sumsel di Tahun 2019 Lebih Target*. <https://sumsel.inews.id/berita/raup-rp313-triliun-pendapatan-pajak-sumsel-di-tahun-2019-lebih-target/2>
- Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-government, audit opinion, and performance of local government administration in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 6–22. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i4.2>
- Talab, H. R., Maki, M. I., Mohammed, Y. N., Flayyih, H. H., & Ibrahim, A. M. (2018). The Role of e-Government on Corruption and its Impact on the Financial Performance of the Government: An Empirical Analysis on the Iraqi Government. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 13(24), 10517–50524.
- Thalib, F., & Ekaningtias, D. (2019). The Effect of Original LG Revenue, Balancing Fund, and Capital Expenditure on LG Financial Performance in Regencies in East Java Province. *The Indonesian Accounting Review*, 9(1), 39. <https://doi.org/10.14414/tiar.v9i1.1704>
- Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of E-Government – A literature review. In *Government Information Quarterly* (Vol. 36, Issue 2, pp. 167–178). Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>